

Penangkapan ikan – Skala usaha penangkapan ikan





© BSN 2015

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun serta dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis dari BSN

BSN
Email: dokinfo@bsn.go.id
www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

Daftar Isi

Prakata	ii
Pendahuluan.....	iii
1 Ruang lingkup.....	1
2 Istilah dan definisi	1
3 Skala usaha penangkapan ikan.....	2
4 Parameter usaha penangkapan ikan.....	2
Tabel 1 - Kriteria skala usaha penangkapan ikan.....	3
Bibliografi	4



Prakata

Skala usaha di bidang penangkapan ikan yang berdaya saing, berkelanjutan dan berkeadilan, maka dipandang perlu untuk ditetapkan standar penangkapan ikan - skala usaha penangkapan ikan.

Standar skala usaha penangkapan ikan, disusun dengan maksud untuk :

1. Menyeragamkan penamaan atau penyebutan skala usaha penangkapan ikan.
2. Menyeragamkan istilah dan definisi pengelompokan skala usaha penangkapan ikan.

Standar ini dirumuskan oleh Sub Komite Teknis 65-05-S1 Perikanan Tangkap, yang telah dibahas melalui rapat teknis dan terakhir disepakati dalam rapat konsensus pada tanggal 03-05 Desember 2014 di Semarang

Standar ini telah melalui proses jajak pendapat dan perpanjangan jajak pendapat pada tanggal 2 Maret 2015 hingga 1 Juni 2015 dengan hasil akhir RASNI.



Pendahuluan

Dalam rangka pengembangan dan pengaturan skala usaha perikanan tangkap yang tangguh, maka diperlukan penetapan dalam skala usaha penangkapan ikan.

Skala Usaha penangkapan ikan dibedakan menjadi 4 yaitu :

1. Skala Usaha Mikro
2. Skala Usaha Kecil
3. Skala Usaha Menengah
4. Skala Usaha Besar

Pengskalaan usaha penangkapan ikan ini diukur berdasarkan parameter usaha antara lain : aset/modal, omset (hasil penjualan per tahun), jumlah tenaga kerja, penerapan teknologi dan status hukum dan perizinan.



Penangkapan ikan - Skala usaha penangkapan ikan

1 Ruang lingkup

Standar ini menetapkan istilah dan definisi, dan kriteria usaha penangkapan ikan.

2 Istilah dan definisi

2.1

skala usaha

ukuran usaha yang dipengaruhi dan ditentukan oleh aset, omset dan tenaga kerja serta penerapan teknologi yang digunakan dan kelengkapan dokumen

2.2

usaha mikro

usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro

2.3

usaha kecil

usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil

2.4

usaha menengah

usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan

2.5

usaha besar

usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan

2.6

usaha perikanan tangkap

usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan

2.7**usaha penangkapan ikan**

usaha yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan

2.8**penangkapan ikan**

kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.

2.9**kapal perikanan**

kapal perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.

2.10**kapal penangkap ikan**

kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetkan ikan.

2.11**alat penangkapan ikan**

sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan

2.12**aset**

nilai harta yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha

2.13**omset (hasil penjualan)**

pendapatan kotor (*bruto*) dari penjualan produk dalam satu tahun

2.14**tenaga kerja**

orang yang dipekerjakan pada unit usaha

3 Skala usaha penangkapan ikan

- a. usaha penangkapan ikan skala mikro
- b. usaha penangkapan ikan skala kecil
- c. usaha penangkapan ikan skala menengah
- d. usaha penangkapan ikan skala besar

4 Parameter usaha penangkapan ikan**4.1. Aset**

- a. kapal penangkap ikan
- b. alat penangkapan ikan
- c. alat bantu penangkapan ikan

4.2. Omset (hasil penjualan)

pendapatan kotor (*bruto*) dari penjualan hasil tangkapan ikan dalam satu tahun.

4.3. Tenaga kerja

jumlah tenaga kerja.

4.4. Penerapan teknologi

penggunaan atau pemanfaatan teknologi pada unit usaha.

4.5. Kelengkapan dokumen kapal dan perizinan

Kelengkapan dokumen berdasarkan skala usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 1 - Kriteria skala usaha penangkapan ikan

No.	Parameter usaha	Skala usaha			
		Mikro	Kecil	Menengah	Besar
1.	Aset : - Harga kapal dan mesin - Harga alat penangkapan ikan dan alat bantu	\leq *50.000.000	>50.000.000 – 500.000.000	> 500.000.000 – 10.000.000.000	> 10.000.000.000
2.	Pendapatan (nilai hasil)/ omset	** \leq 300.000.000 0	>300.000.000 0 – .2,5 M	>2,5 M-50 M	>50 M
3.	Jumlah tenaga kerja	s/d 5 orang	s/d 16 orang	s/d 40 orang	> 40 orang
4.	Penerapan teknologi	Sederhana tanpa alat bantu	Sederhana dengan alat bantu sederhana	Semi Modern dengan alat bantu mekanik, elektrik, dan hidrolik	Modern dengan alat bantu mekanik, elektrik, hidrolik, dan komputerisasi
5.	Kelengkapan dokumen kapal dan perizinan	Pas kecil, SIUP, SIPI	Pas tahunan, SIUP, SIPI	SIUP, SIPI, Surat ukur	SIUP, SIPI, Surat ukur

Bibliografi

Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang No. 45 Tahun 2009

Undang-undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan

